

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Menurut Surdasono dan Edilius : **“Koperasi yang kita maksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai rules dan regulations) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar”**.¹ Koperasi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga harus dikelola secara professional. Untuk itu suatu koperasi juga harus memberikan perhatian pada kegiatan manajerial, akuntansi, maupun sistem informasi yang diterapkan dalam kegiatan operasionalnya

Menurut Ninik Widiyati menyatakan bahwa:

Tujuan suatu koperasi ialah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Karena itu yang menjadi ukuran bagi keberhasilan suatu koperasi bukan ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha atau laba yang besar, melainkan diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat memperoleh pelayanan dari koperasi.²

¹ Surdasono dan Edilius, **Koperasi, Dalam Teori dan Praktik**, Cetakan kelima: Rineka Cipta, 2010, hal 1.

² Ninik Widiyati, **Manajemen Koperasi**, Cetakan kesepuluh: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.17

Sebagai koperasi, sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan modal biaya bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untung yang sebesar-besarnya. Akan tetapi mengingat koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya.

Pada perusahaan kecil, biasanya pemilik perusahaan juga bertindak sebagai manajer dan yang dapat langsung mengawasi segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Organisasi dalam perusahaan juga ikut berkembang, dan persaingan dunia bisnis dewasa ini mengharuskan perusahaan untuk memandang jauh kedepan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dan dapat mempengaruhi perkembangan perusahaannya dimasa mendatang. Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang akan dicapai, baik berupa laba yang maksimal, kelangsungan hidup, pertumbuhan perusahaan maupun menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat. Salah satu usaha perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melalui akuntansi pertanggungjawaban untuk mengukur hasil kinerja yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban.

Setiap manajer pusat pertanggungjawaban akan membuat ikhtisar dari pelaksanaan kegiatan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berada dibawah pengawasannya dan ikhtisar ini dilaporkan secara periodik. Setiap pusat pertanggungjawaban akhirnya harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya.

Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dasar yang digunakan untuk

menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui anggaran. Anggaran harus jelas menunjukkan pendapatan, biaya dan investasi yang diawasi oleh pihak yang berwenang. Perkiraan harus disesuaikan supaya dapat melakukan pencatatan terhadap biaya, pendapatan dan investasi.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis : **Akuntansi Pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan**³

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan pada suatu perusahaan. Selain itu beberapa hasil penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban dapat dikemukakan sebagai berikut.

Olivia Sicilia peneliti terdahulu tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian untuk penilaian kinerja. Penelitian dilakukan pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan belum berjalan dengan baik, karena manajemen belum menerapkan unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban seutuhnya dan tidak menelusuri secara detail atas penyimpangan yang ada.

Mandak (2013), peneliti terdahulu tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Manado. Dari hasil penelitian ini, penerapan akuntansi pertanggungjawaban cukup baik. Tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi

³ Arfan Ikhsan Lubis, **Akuntansi Keperilakuan, Edisi 2**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal.204.

pengendalian biaya adalah dengan membandingkan antara anggaran biaya dan realisasi biaya, Dinas Perhubungan Manado perlu membagi kembali pusat pertanggungjawaban sesuai dengan terstruktur organisasi yang telah ada yang berguna untuk mempermudah proses pengendalian biaya juga sebaliknya dilakukan pemisahan biaya-biaya yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

Demikian halnya Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih merupakan salah satu organisasi nirlaba yang tidak bertujuan memperoleh laba sebesar-besarnya tetapi mempunyai aktivitas usaha. Walaupun usaha koperasi bukan semata-mata berorientasi pada laba namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan (tidak merugi) sehingga kelangsungan usahanya dapat berjaga dalam hal ini laba berperan penting. Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih mengalami penurunan sisa hasil usaha tahun 2017 dibanding tahun 2016, seperti tertera pada tabel 1.1 koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih mengalami penurunan sisa hasil usahasebesar Rp.96.550.950 pada tahun 2017 dibanding tahun 2016, sehingga perlu dievaluasi bagaimana pendapatan dan beban dipertanggungjawabkan pada perusahaan nirlaba.

Tabel 1.1
Daftar Pendapatan dan Biaya
Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017
Pendapatan	Rp.1.170.549.750	Rp.946.307.300
Beban	Rp. 738.617.900	Rp.610.926.400
Sisa hasil usaha	Rp. 431.931.850	Rp.335.380.900

Sumber :Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi.

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan. Untuk mengetahui hal itu maka penulis melakukan proses penilaian kinerja keuangan dengan memfokuskan pada pusat pendapatan dan beban, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan maka akan diketahui dengan jelas siapa yang harus bertanggungjawab.

Sesuai uraian tersebut maka perlu dibahas peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan terutama perencanaan, pengendalian, dan pelaporan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dalam tulisan skripsi dengan **judul : AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CINTA KASIH MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatan operasinya koperasi tidak akan pernah luput dari masalah yang merupakan faktor penghambat kelancaran kerja dalam mencapai tujuan koperasi yang sehat. Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi akan berbeda satu sama lainnya dan tergantung pada bentuk dan jenis usaha yang bersangkutan.

Definisi masalah menurut Sumadi Sugiyono adalah : **Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.**⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban untuk menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis serta memfokuskan pada pembahasan masalah yang dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian dan pembahasan hanya berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan.

⁴Sugiyono, **Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan Kesembilanbelas : Alfabeta, Bandung, 2016, hal.32

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana akuntansi pertanggungjawaban dipraktekkan pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan sebagai alat pengukur kinerja.
- b. Bagi manajemen perusahaan, yang diteliti sebagai bahan koreksi/masukan bagi manajemen perusahaan mengenai bagaimana menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan agar dapat digunakan dalam mengambil langkah yang lebih baik pada masa datang untuk mengukur kinerja.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi Peneliti yang akan mengadakan penelitian tentang akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja.

BAB 2

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Suatu perusahaan yang berskala kecil, pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh seorang individu yang sama, yang biasanya adalah pemilik perusahaan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan, keputusan tidak lagi dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi membutuhkan pelimpahan wewenang kepada beberapa orang yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menjalankan usahanya dan menghadapi berbagai situasi yang sedang berkembang, perusahaan membutuhkan informasi agar dapat mengantisipasi segala peluang dan ancaman. Salah satu informasi yang dibutuhkan itu adalah informasi manajemen. Dalam akuntansi manajemen inilah dikenal adanya akuntansi pertanggungjawaban yang mengakui adanya pusat-pusat pertanggungjawaban.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki daya tarik bagi kebanyakan pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, karena hal itu memudahkan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, karena hal itu memudahkan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam pihak, akuntansi pertanggungjawaban memberikan sarana untuk mengadakan evaluasi

atas kemampuan setiap manajer dan membantu pengambilan keputusan dalam memberikan insentif bagi setiap manajer melalui laporan prestasi kerja.

Akuntansi merupakan suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi maupun data financial yang telah lalu. Data yang disajikan akan membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya melalui laporan yang disajikan sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab yang telah ditetapkan. Proses mengumpulkan dan melaporkan data operasi menurut tempat pertanggungjawaban dikenal dengan istilah akuntansi pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban ini menelusuri biaya, pendapatan, laba, dan investasi untuk setiap unit organisasi dimana unit organisasi merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas unitnya.

Akuntansi pertanggungjawaban mempunyai beberapa defenisi yang ditemukan oleh para ahli. Walaupun defenisi tersebut berbeda-beda akan tetapi pada dasarnya akan menunjukkan hal yang sama. Ada beberapa pendapat yang ditemukan para ahli tentang akuntansi pertanggungjawaban, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Rimbun Sidabutar (2015) mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: **"Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bidang dari akuntansi**

manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh setiap manajer”.⁵

Menurut Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :**“Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban”.**⁶

Dari beberapa defenisi tersebut dapat diketahui bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan melaporkan data operasi dari setiap tingkatan manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. Informasi yang disajikan berupa anggaran dan realisasi serta selisih yang terjadi diantara keduanya yang nantinya dapat digunakan manajemen sebagai alat pengawasan atas biaya terjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan konsep-konsep yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban harus didukung dengan adanya struktur organisasi yang jelas. Dengan struktur organisasi yang jelas agar memberikan gambaran yang jelas pula mengenai batas wewenang dan tanggungjawab suatu departemen serta untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian biaya-biaya yang menjadi tanggungjawab manajer yang bersangkutan. Adapun Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yaitu :

⁵ Rimbun Sidabutar, **Akuntansi keperilakuan**, Cetakan Pertama, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal 73

⁶**Op.cit.**, Arfan Ikhsan Lubis, hal.203.

1. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasidengan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran.Dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, secara prinsip individu hanya diminta pertanggungjawaban menyajikan informasi biaya sesungguhnya dan informasi biaya yang dianggarkan kepada manajer yang bertanggungjawab, untuk memungkinkan setiap manajer mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka.

2.2 Tujuan Dan Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban

2.2.1 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Untuk tujuan ini sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang untuk memperkuat dan mendorong adanya keharmonisan dan kesatuan tujuan dalam perusahaan.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2005 tujuan utama dari sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah“**memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan secara menyeluruh**”.⁷

⁷ Ibid., hal.204

Didalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban itu sendiri. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam akuntansi pertanggungjawaban yaitu :

1. Untuk memotivasi setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Untuk memperoleh suatu penelitian kualitas kinerja dari setiap manajer pusat pertanggungjawaban yang berarti bahwa akan dinilai bagaimana seorang manajer melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Untuk menentukan kontribusi dari setiap pusat pertanggungjawaban dari suatu organisasi.

Berdasarkan tujuan-tujuan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

2.2.2 Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya bekerja untuk menelusuri biaya, hasil, laba, dan investasi dari setiap unit organisasi. Oleh karena itu setiap pimpinan perusahaan harus mampu mengkoordinasi masing-masing departemennya dengan baik mungkin dalam usaha memaksimalkan laba yang diusahakan serendah mungkin. Seorang pimpinan pada perusahaan kecil masih sanggup langsung mengambil tindakan yang berhubungan dengan operasi pada perusahaan tersebut.

Berbeda dengan perusahaan besar, pimpinan perusahaan tidaklah sanggup mengatasi secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik itu menyangkut personalia, produksi, informasi, keuangan, hukum, dan pengembangan.

Dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban berperan penting dalam pendelegasian wewenang tersebut dan memberikan fungsi sebagai berikut :

1. Manajer-manajer dari unit organisasi adalah spesialis, artinya manajer setiap unit organisasi mempunyai khusus yang memungkinkan mereka memimpin dan mengarahkan departemennya secara efektif.
2. Memberi manajer sejumlah otonomi untuk membuat keputusan-keputusan dapat merupakan latihan manajerial untuk menjadi pimpinan-pimpinan puncak pada mendatang.
3. Manajer yang diberi sejumlah wewenang untuk membuat keputusan biasanya menunjukkan motivasi yang lebih besar dibandingkan dengan manajer yang hanya melaksanakan keputusan pimpinannya.
4. Mendelegasikan sejumlah wewenang kepada manajer bawahan (*subordinate manager*) memberikan kelonggaran waktu bagi manajer atasan (*upper level manager*) mengkosentrasikan diri pada pembuatan-pembuatan rencana strategi.
5. Pendelegasian wewenang-wewenang pembuatan keputusan pimpinan kepada lapisan paling bawah dari organisasi atau perusahaan memungkinkan perusahaan dapat tangkap secara tepat waktu terhadap

kesempatan (*opportunity*) dan permasalahan, begitu permasalahan-permasalahan dan kesempatan timbul.

2.3 Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan berhasil jika rencana (anggaran) yang disusun oleh manajemen dapat direalisasikan. Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Struktur Organisasi

Dalam membahas sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi selalu dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer yang ada dalam perusahaan, oleh karena itu setiap manajer didalam organisasi harus bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang berada di bawah pengendaliannya. Dengan kata lain, manajer yang disertai wewenang dari pimpinan perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi yang disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab setiap manajer menjadi lebih jelas.

Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggungjawab dalam satu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada pada jajaran garis tersebut. Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tiap-tiap pimpinan jelas atas segala kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya. tanggungjawab timbul karena

diberikan wewenang mengalir dari atas ke bawah. Struktur organisasi terbagi menjadi dua bagian.

a. Organisasi Fungsional

Organisasi fungsional atau disebut dengan juga organisasi sentralisasi adalah organisasi yang mana setiap manajernya bertanggungjawab atas aktivitas operasi perusahaan berdasarkan fungsi manajer yang bersangkutan.

b. Organisasi Divisional

Organisasi divisional adalah organisasi yang aktivitas atau kegiatan fungsionalnya dilaksanakan untuk tiap unit kerja dalam ruang lingkup organisasi itu sendiri. Tujuan proses divisional adalah untuk pendelegasian otoritas kerja yang lebih besar kepada manajer operasional.

2. Anggaran Biaya

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan atas sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran.

3. Penggolongan Biaya

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.

4. Sistem Akuntansi

Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antar biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan. Pemberian kode rekening diperlukan untuk memudahkan mencari perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui dan membedakan perkiraan-perkiraan tersebut, maka kode yang diberikan harus disusun secara konsisten.

5. Sistem Pelaporan Biaya

Salah satu unsur terpenting dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggungjawab, laporan pertanggungjawaban berisi informasi tentang biaya yang dianggarkan, realisasi biaya, presentase biaya realisasi dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Laporan pertanggungjawaban berisi informasi yang berguna bagi

pengambilan keputusan manajer. Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya.

2.4 Pusat-Pusat Akuntansi Pertanggungjawaban

Definisi tentang pusat pertanggungjawaban yang telah dirumuskan oleh para ahli, pada dasarnya peningkatannya tidak jauh berbeda. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut.

Pada tingkatan yang terendah bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya, pada tingkatan yang lebih tinggi pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen ataupun divisi-divisi. Biasanya istilah pusat pertanggungjawaban hanya kita terapkan untuk unit-unit kecil dalam organisasi ataupun unit-unit kerja yang terletak pada tingkat bawah dalam suatu lingkup organisasi.

Menurut Hansen dan Mowen : **“Pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*) merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu”**.⁸

Dengan demikian dari berbagai pendapat diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab

⁸ Hansen dan Mowen, **Akuntansi Manajerial**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal.560

atas aktivitas unit yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat berupa unit organisasi seperti seksi, segmen, departemen, divisi atas sebuah perusahaan.

Pusat-pusat pertanggungjawaban dapat dibagi atas empat jenis yaitu:

1. Pusat Biaya (*cost center*) yaitu:

Suatu organisasi dimana manajernya bertanggungjawab atas biaya-biaya yang terjadi di dalam unit tersebut. Seluruh biaya yang terjadi atau seluruh kegiatan yang menyebabkan terjadinya biaya-biaya tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh manajer pusat biaya. Setiap masukan pada pusat biaya diukur dengan nilai uang. Oleh karena itu pengumpulan dan perolehan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus dapat diawasi dan dikendalikan dengan baik. Manajer pusat biaya mengawasi biaya dan tidak melakukan pengawasan atas pendapatan dan investasi.

2. Pusat Pendapatan (*revenue center*) yaitu:

Suatu unit organisasi dimana manajemen pertanggungjawaban atas pendapatan yang dicapai oleh unit organisasi yang dipimpinnya. Keluaran pusat pendapatan diukur dengan nilai uang. Sedangkan masukan tidak diukur dengan nilai uang. Berdasarkan hal tersebut, pusat pendapatan tidak dianggap sebagai pusat laba, karena biaya-biaya yang terlihat disini belum merupakan biaya yang lengkap atau tidak komplit. Disamping itu manajer pusat pendapatan tidak bertanggungjawab serta tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi investasi dalam harta. Penilaian kinerja manajer pusat pendapatan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya.

3. Pusat Laba (*profit center*) yaitu:

Pusat pertanggungjawaban yang prestasi keuangan dari pusat tersebut diukur berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Laba terjadi sebagai perbandingan antara masukan (pendapatan) dengan keluaran (biaya). Dengan demikian maka manajer pusat laba bertanggungjawab atas biaya dan pendapatan yang timbul pada perusahaan tersebut. Manajer pusat laba mempunyai tanggungjawab untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal. Penilaian kinerja pusat laba diukur dengan menilai apakah laba yang telah dianggarkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. Menurut Adanan dan Meilinda, perusahaan yang menggunakan pusat laba memiliki manfaat utama sebagai berikut :

- 1) **Kualitas keputusan meningkat karena keputusan dilakukan oleh manajer yang berkaitan langsung dengan obyek keputusan.**
- 2) **Pusat laba menyediakan suatu alat yang baik untuk mengukur seberapa baik kinerja pusat laba.**
- 3) **Kecepatan keputusan operasional dapat meningkat, karena tidak harus perlu mendapat persetujuan dari manajer kantor pusat.**
- 4) **Manajer termotivasi untuk bekerja secara efektif, karena manajer bertanggungjawab untuk meningkatkan laba dari unit yang dipimpinnya.⁹**

⁹Adanan dan Meilinda, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas HKBP Nommensen, 2017, hal.137.

4. Pusat Investasi (*investment center*) yaitu:

Suatu unit organisasi dimana manajernya bertanggungjawab terhadap penggunaan harta yang ditanamkan seperti halnya untuk penghasilan biaya dan jumlah investasi yang ada didalamnya. Pimpinan dari pusat investasi ini tidak bertanggungjawab terhadap laba, tetapi hubungan laba dengan asset yang diinvestasikan untuk memperoleh laba tersebut (*return on investment*) menjadi tanggungjawabnya. Jadi prestasi keuangan manajer dinilai dengan membandingkan antara laba atas investasi yang dicapai dengan yang dianggarkan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Ukuran ini disebut dengan *Return On Investment (ROI)*. Dapat pula diukur prestasinya dengan menggunakan *Residual Income (RI)*, yang merupakan laba dikurangi dengan beban modal (*capital charge*).

2.5 Hubungan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran

Ide pokok akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab terhadap elemen-elemen yang secara langsung berada di bawah pengendaliannya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang di desain secara khusus dan di implementasikan untuk menilai kinerja manajer pusat-pusat pertanggungjawaban. Tanggungjawab manajer adalah pendapatan, biaya laba dan investasi sesuai dengan jenjang manajemen pusat pertanggungjawaban.

Sesuai dengan ide pokok tersebut, anggaran harus disusun untuk setiap jenjang manajemen pusat pertanggungjawaban yang dibebani tanggungjawab atas pendapatan, biaya, laba dan investasi. Melalui laporan kinerja, anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan realisasinya sehingga dapat ditentukan kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Sebagai akibatnya sistem akuntansi pertanggungjawaban memandang pendapatan, biaya, laba dan investasi dari sudut pengendalian pribadi atau kinerja manajer dan bukan dipandang dari kinerja ekonomi. Kinerja manajer atau pengendalian pribadi adalah kinerja untuk menunjukkan seberapa baik manajer tersebut dalam mengelola pusat pertanggungjawabannya. Kinerja ekonomi adalah kinerja untuk menunjukkan kemampuan suatu pusat pertanggungjawaban sebagai suatu entitas ekonomi.

Anggaran dapat menunjukkan sumber daya yang boleh dipakai sebuah pusat pertanggungjawaban, sumber daya yang harus diperoleh pusat pertanggungjawaban ataupun keduanya. Hal ini disebabkan akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi akuntansi pertanggungjawaban yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Pada awal tahun anggaran, anggaran merupakan harapan bagi manajemen. Pada akhir tahun anggaran, anggaran merupakan standar untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban.

2.6 Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja

2.6.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah penampilan hasil karya seseorang baik dalam hal kuantitas ataupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga keseluruhan jajaran organisasi.

Kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu tujuan, ukuran dan penilaian. Dimana penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana harusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian penentuan saja belum cukup, maka dibutuhkan ukuran apakah seorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk itu ukuran kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan penting.

Penilaian atau pengukuran kinerja dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personel. Dari uraian tersebut maka jelaslah bahwa pengertian kinerja dalam tiga komponen penting diatas mempunyai peranan penting dalam merawat dan meningkatkan motivasi personel.

2.6.2 Pengukuran Kinerja

Menurut Wibowo, Pengukuran Kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi.**
- 2) Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.**
- 3) Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja.**
- 4) Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian.**

- 5) Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas.
- 6) Mempertimbangkan penggunaan sumber daya.
- 7) Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.¹⁰

Sistem pengukuran kinerja suatu perusahaan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membangun manajer menilai pencapaian suatu strategi dan ukuran kinerja terdapat baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan.

Menurut Dewi Utari dkk, mengemukakan bahwa :**“Kinerja perusahaan dapat diukur berdasar kinerja keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja keuangan yang lazim digunakan adalah likuiditas, leverage, aktivitas, dan profabilitas. Sedangkan pengukuran kinerja non-keuangan yang lazim digunakan adalah efisiensi, kualitas, dan waktu”**.¹¹

Alat pengukuran kinerja dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : alat ukur kinerja keuangan dan alat ukur kinerja non-keuangan.

1. Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-terusan oleh manajemen keuangan. Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas mencakup laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan dalam laporan biaya aktivitas dan anggaran siklus hidup.

Dalam mengukur penilaian kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggungjawab yang diwujudkan

¹⁰ Wibowo, **Manajemen Kinerja**, Edisi 2 : Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.344.

¹¹ Dewi Utari dkk, **Akuntansi Manajemen (Pendekatan Praktis)**, Edisi 4 : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.76.

dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Namun demikian mengatur besarnya tanggungjawab sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab ada yang dapat diukur dengan mudah dan ada pula yang sukar diukur.

2. Penilaian Kinerja Non-Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pengukuran yang dilakukan dalam suatu fisik bukan suatu uang serta lebih memfokuskan pengukuran pada salah satu aspek kinerja. Ukuran Kinerja non-keuangan sering disebut ukuran operasional adalah ukuran kinerja aktivitas secara fisik, ukuran operasional harus berhubungan dengan kinerja aktivitas efisiensi, kualitas, dan waktu.

Pengukuran kinerja non-keuangan merupakan pengukuran yang dilakukan dalam satuan fisik bukan dalam satuan mata uang serta lebih memfokuskan pengukuran pada salah satu aspek kinerja. Pengukuran tersebut lebih menunjukkan pada pihak manajemen tentang proses yang sedang berlangsung, yang bermanfaat memberikan informasi kepada manajemen untuk mengidentifikasi masalah dalam rangka mencapai kesuksesan.

Penilaian kinerja pada pusat-pusat pertanggungjawaban antara lain:

1. Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan

Informasi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Jika pusat pendapatan hanya menjual produk atau jasanya kepada pihak luar perusahaan, pengukuran pendapatan dilaksanakan dengan mudah yaitu dengan cara mengalihkan kuantitas produk atau jasa yang dijual dengan harga jual yang dibebankan kepada pelanggan. Biasanya pendapatan ini dimasukkan ke pusat laba untuk menghitung berapa laba yang didapat oleh

perusahaan. Pengukuran kinerja pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasi pendapatan. Pengukuran kinerja pusat pendapatan juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan tahun sekarang dengan pendapatan tahun sebelumnya.

2. Penilaian Kinerja Pusat Biaya

Informasi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pada pusat biaya ini adalah biaya. Sama seperti pendapatan, biaya juga dimasukkan pada pusat laba untuk menghitung berapa laba yang didapat oleh perusahaan. Pengukuran kinerja pada pusat biaya dapat dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya yang menimbulkan penyimpangan. Pengukuran kinerja pusat biaya dapat juga dilakukan dengan membandingkan biaya tahun sekarang dengan biaya tahun sebelumnya.

Dalam mengukur kinerja biaya untuk menghasilkan pendapatan, dapat digunakan konsep anggaran fleksibel. Selain itu analisis anggaran fleksibel juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas dari penggunaan biaya, terutama biaya operasional dalam kaitannya dengan pendapatan. Menurut Darsono dan Aribahwa: **“Anggaran fleksibel ialah anggaran yang dibuat berdasarkan beberapa titik aktivitas (beberapa tingkat aktivitas tertentu) yang ditentukan dahulu”**.¹²

¹²Darsono dan Ari. **Penganggaran Perusahaan, Teknik mengetahui Dan Memahami Penyajian Anggaran Perusahaan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Dan Pengendalian Aktivitas Bisnis**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal.165

Contoh anggaran fleksibel dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Anggaran Fleksibel

Keterangan	Anggaran	Aktual	Varian
Penjualan (unit)	7000	7.000	0
Penjualan (Rp)	140.000	154.000	14.000
Biaya variabel :			
- Biaya bahan baku	35.000	35.700	700
- Biaya upah buruh	28.000	27.300	700
- Biaya overhead pabrik	21.000	21.700	700
Marjin kontribusi kotor	56.000	69.300	13.300
Biaya pemasaran	14.000	16.100	2.100
Biaya administrasi	7.000	6.300	700
Marjin kontribusi	35.000	46.900	11.900
Biaya tetap :			
- Biaya overhead pabrik	2.400	2500	100
- Biaya pemasaran	1.600	1400	200
- Biaya administrasi	1.200	1.600	400
Laba operasi	29.800	41.400	11.600

Sumber : Darsono P dan Ari, 2008, hal.168.

3. Penilaian Kinerja Pusat Laba

Penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kinerja pusat laba, maka perlu dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajer pada pusat laba yaitu produktivitas. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan produksi atau keluaran secara efisien dan terutama ditunjukkan kepada hubungan antara keluaran dan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut.

4. Penilaian Kinerja Pusat Investasi

Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan dikaitkan dengan besarnya investasi yang ditanamkan. Pengukuran berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawabannya sehingga investasi dianggap sebagai perluasan dari pengukuran prestasi pusat laba.

Dalam buku Harmono mengemukakan bahwa :**“Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (*laba*) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earning per share*).¹³**

¹³ Harmono, **Manajemen Keuangan, Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis**, Edisi 1, Cetakan Enam : Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal.23.

Adapun ukuran prestasi yang sering dipakai di pusat investasi adalah ROI (*Return On Investment*). Oleh sebab itu, dalam pusat investasi manajer harus berhati-hati dalam menentukan besar dana investasi yang diperlukan.

2.6.3 Hubungan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Kinerja

Informasi akuntansi pertanggungjawaban penting dalam mengevaluasi kinerja seseorang pengurus atau karyawan dalam suatu organisasi. Kinerja dinilai berdasarkan kemampuan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan demikian informasi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi yang sesungguhnya. Penilaian kinerja juga sangat menentukan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personel berdasarkan sasaran standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena pada dasarnya organisasi dioperasikan oleh sumber daya manusia sehingga penilaian kinerja penting dalam menilai perilaku manusia dalam melaksanakan perannya dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja dimanfaatkan untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kuantansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan, yang beralamat di jln. Mustapa No.58 Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam memperoleh data serta berbagai keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua metode yaitu :

1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu cara penelitian yang berpedoman pada bahan-bahan yang relevan serta mendukung pokok pembahasan melalui perpustakaan.

Sumber informasi kepustakaan pada dasarnya adalah segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen, buku teks, majalah, atau bahan tertulis lainnya, termasuk teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya (*findings*). Studi ini dinamakan pula dengan tinjauan pustaka”.¹⁴

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan melalui buku-buku teori, artikel dan catatan-catatan kuliah yang relevan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar teori yang kuat untuk memahami bahan penulisan, karena tanpa dasar teori yang kuat maka objek yang diteliti akan sulit untuk dianalisis dengan demikian data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagai kerangka kerja teoritis.

2. Penelitian Lapangan

¹⁴ Elfis.Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 57

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer melalui observasi, dan wawancara, lisan kepada orang yang berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pendapatan, dan pertanggungjawaban beban.

3.3 Sumber Metode Pengumpulan Data

Ada 2 (dua) sumber dan metode pengumpulan data yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang secara langsung diperoleh dari sumber pertama, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif, dan masih perlu diolah lagi. Untuk sumber data primer penelitian ini adalah wawancara.
2. Data sekunder, menurut Sijabat, dalam bukunya Metodologi Penelitian Akuntansi:

“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen-tasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi”¹⁵

Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang telah diolah dan disajikan Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan. Untuk memperoleh data sekunder tersebut penulis melakukan metode dokumentasi, dengan mendokumentasikan kembali sejarah singkat perusahaan, gambaran umum kegiatan perusahaan, laporan keuangan berupa sisa hasil usahatahun 2016-2017.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Deskriptif

¹⁵Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, 2014, hal.82.

Metodedeskriptif adalah metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis selanjutnya di interpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang teliti.

2. Metode Deduktif